

# BAHASA INDONESIA SEBAGAI INFRASTRUKTUR DIPLOMATIK: ANALISIS EKONOMI-POLITIK ATAS STRATEGI EKSPANSI BIPA DI ASIA TENGGARA

**Ari Wibowo**

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
ari\_wibowo@kemenkeu.go.id

---

**Abstrak:** *Language is no longer viewed solely as a tool of communication but has evolved into a form of diplomatic infrastructure that strategically shapes perception, influence, and international relations. This study investigates the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) program as part of Indonesia's soft power strategy and cultural-political economy agenda in Southeast Asia. Adopting a qualitative-descriptive method based exclusively on secondary data sources (such as policy documents, regulations, institutional reports, and scholarly literature), the research seeks to explore the geopolitical significance of BIPA's expansion. Findings reveal that BIPA has become a key mechanism for promoting Indonesian culture and values through both bilateral and multilateral frameworks, reinforcing Indonesia's regional diplomatic presence. The program exemplifies a non-coercive strategy of influence amidst the competitive landscape of global languages such as English and Mandarin. However, institutional fragmentation, absence of integrated performance indicators for language diplomacy, and limitations in human resource capacity and instructional materials continue to hinder its full potential as a strategic asset. This paper recommends the establishment of a cross-ministerial national language diplomacy agency and the formal integration of BIPA into ASEAN's cultural cooperation frameworks and Indonesia's foreign policy agendas. By doing so, BIPA can transcend its role as a language education initiative and be repositioned as a tool of national interest negotiation and global identity formation.*

**Kata Kunci:** *BIPA, language diplomacy, political economy, soft power, Southeast Asia*

---

## **Pendahuluan**

Dalam era pergeseran kekuatan global yang ditandai oleh ketegangan geopolitik dan kompetisi simbolik antarbangsa, bahasa telah menjadi instrumen strategis dalam membentuk pengaruh lunak negara. Bahasa tidak lagi hanya dipandang sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai aset simbolik yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi suatu negara dalam kancah diplomasi global (Quinn, 2017). Dalam konteks ini, program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) bukan sekadar sarana pengajaran linguistik, tetapi telah bertransformasi menjadi kanal diplomasi budaya yang membawa narasi pluralisme, toleransi, dan identitas Indonesia ke panggung internasional (Putera, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penutur asli bahasa terbesar kedua di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai kekuatan lunak kawasan. Namun demikian, daya saing global Bahasa Indonesia masih tertinggal dibandingkan bahasa besar lainnya seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin yang secara aktif didukung oleh infrastruktur lembaga internasional seperti British Council dan Confucius Institute (Sambas, Napitupulu, & Syaputra, 2022). Di sisi lain, inisiatif BIPA terus tumbuh di berbagai negara ASEAN melalui kerja

sama bilateral, inisiatif universitas, dan dukungan diplomatik, namun belum sepenuhnya didukung oleh strategi nasional yang sistemik dan berkelanjutan (Nugraheni et al., 2024).

BIPA sebagai program strategis juga memiliki nilai tambah dalam membangun jejaring sosial lintas negara, memperkuat citra positif bangsa, serta menciptakan keterhubungan kultural yang memperkuat kohesi regional ASEAN (Rohimah, 2018). Sebagaimana dicatat oleh Suyitno (2017), pengajaran Bahasa Indonesia kepada penutur asing memiliki potensi untuk membentuk persepsi global yang lebih inklusif dan merepresentasikan keberagaman budaya lokal Indonesia. Hal ini menjadi sangat relevan dalam era pasca-globalisasi di mana narasi kebangsaan bersifat kompetitif dan berperan dalam arsitektur pengaruh regional.

Namun demikian, ekspansi BIPA di Asia Tenggara tidak terlepas dari berbagai tantangan institusional, seperti ketimpangan mutu pengajaran, belum adanya standar kurikulum nasional, serta keterbatasan koordinasi lintas kementerian (Kurniasih, 2021; Arumdyahsari et al., 2016). Selain itu, belum adanya regulasi yang kuat dan insentif kelembagaan yang jelas menyebabkan banyak program BIPA bergantung pada inisiatif lokal yang rentan terhadap disrupsi (Kusmiatun, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi-politik untuk memahami bagaimana kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan struktur kelembagaan membentuk arah ekspansi BIPA ke depan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. BIPA dalam Kerangka Diplomasi dan *Soft Power*

Program BIPA sejak awal dirancang tidak semata untuk tujuan linguistik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi budaya. Dalam kerangka *soft power* sebagaimana dikembangkan oleh Nye (2004), bahasa merupakan salah satu instrumen kunci dalam menyampaikan nilai-nilai suatu bangsa, memperluas pengaruhnya, dan membentuk persepsi positif di antara komunitas internasional. Rohimah (2018) menjelaskan bahwa BIPA berperan penting dalam membangun diplomasi halus Indonesia yang tidak bersifat koersif, tetapi mampu menciptakan kedekatan sosial dan afiliasi kultural dengan negara-negara mitra.

Putera (2024) dalam studinya mengenai strategi diplomasi Indonesia di Azerbaijan menunjukkan bahwa program BIPA menjadi elemen penting dalam memperkuat jejaring antarbudaya dan menumbuhkan simpati diplomatik terhadap Indonesia. Dalam konteks ASEAN, BIPA juga dilihat sebagai upaya membangun *linguistic goodwill* yang memperkuat integrasi regional serta memperluas daya tarik budaya Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin intensif.

### 2. Bahasa sebagai Infrastruktur Sosial dan Komoditas Budaya

Kajian sosiolinguistik dan ekonomi politik menempatkan bahasa bukan hanya sebagai sistem simbolik, melainkan sebagai infrastruktur sosial yang menghubungkan individu, institusi, dan identitas nasional. Quinn (2017) menyebutkan bahwa bahasa berperan sebagai saluran transmisi nilai dan ideologi yang menyusun fondasi diplomasi budaya. Bahasa Indonesia, dalam konteks BIPA, dapat diposisikan sebagai *cultural infrastructure* yang menghubungkan kepentingan diplomatik dan budaya Indonesia ke dalam ruang transnasional.

Selain itu, Wicaksono (2017) menyoroti bahwa bahasa juga dapat menjadi komoditas budaya ketika dikembangkan dan dipasarkan secara sistemik oleh negara. Hal ini terlihat pada bagaimana negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Prancis menginstitusionalisasikan bahasa nasional mereka dalam bentuk lembaga internasional. Dalam konteks Indonesia, BIPA adalah bentuk awal dari komodifikasi bahasa yang perlu dikelola secara lebih profesional dan strategis agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, simbolik, dan diplomatik secara simultan.

### 3. Dinamika Ekspansi BIPA dan Tantangan Institusional

Ekspansi program BIPA ke berbagai negara mitra menunjukkan meningkatnya minat internasional terhadap Bahasa Indonesia, terutama di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ekspansi ini masih dibayangi oleh tantangan kelembagaan dan kebijakan. Nugraheni et al. (2024) mengidentifikasi sejumlah hambatan mulai dari kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, hingga ketiadaan indikator kinerja diplomasi bahasa yang baku.

Aninditya (2015) juga menekankan adanya ketimpangan dalam pelatihan dan sertifikasi pengajar BIPA, terutama di kawasan ASEAN yang menjadi prioritas ekspansi. Selain itu, Arumdyahsari et al. (2016) menggarisbawahi pentingnya pengembangan bahan ajar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik asing. Tanpa tata kelola yang terstandar dan lintas sektoral, potensi BIPA sebagai alat *soft power* tidak akan dapat mencapai efektivitas optimal di kawasan.

### 4. Internalisasi Budaya Lokal dan Integrasi Regional

Salah satu dimensi penting dari BIPA adalah kemampuannya untuk membawa budaya lokal Indonesia ke dalam ruang kelas global. Arwansyah et al. (2017) menunjukkan bahwa pengintegrasian unsur budaya lokal dalam bahan ajar BIPA tidak hanya memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya warisan budaya, tetapi juga memperkuat afiliasi emosional peserta didik terhadap nilai-nilai keindonesiaan.

Dalam konteks regional, BIPA dapat menjadi jembatan integrasi budaya ASEAN melalui jalur pendidikan dan pertukaran kultural. Rosiyana (2020) menekankan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis *cultural immersion* sangat efektif untuk membangun kedekatan lintas negara. Dengan memasukkan dimensi kearifan lokal ke dalam pengajaran BIPA, Indonesia tidak hanya mengekspor bahasa, tetapi juga menyebarkan cara pandang khas yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional yang berbasis identitas dan nilai budaya bersama.

### 5. Teori *Soft Power* (Joseph Nye)

Konsep *soft power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye menjadi fondasi utama dalam memahami peran BIPA sebagai instrumen diplomatik. Nye (2004) mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk membujuk dan menarik negara lain tanpa tekanan atau paksaan, melainkan melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan legitimasi kebijakan luar negeri.

Dalam konteks BIPA, bahasa Indonesia berfungsi sebagai wahana yang menyampaikan bukan hanya keterampilan linguistik, tetapi juga narasi identitas, toleransi, dan kekayaan budaya Indonesia kepada komunitas internasional. Rohimah (2018) menegaskan bahwa strategi penyebaran BIPA mencerminkan bentuk konkret diplomasi lunak Indonesia yang bertujuan memperkuat pengaruh secara simbolik di kawasan.

Melalui program BIPA, Indonesia mengembangkan daya tarik kultural secara sistematis, seraya membangun jejaring sosial dan institusional yang memperkuat hubungan diplomatik jangka panjang. Daya tarik ini semakin strategis ketika ditempatkan dalam konteks regional ASEAN, di mana *soft power competition* menjadi medan utama dalam merebut simpati negara-negara tetangga tanpa konflik terbuka.

### 6. Teori Ekonomi Politik Global

Teori ekonomi politik global berfokus pada interaksi antara kekuasaan, pasar, dan kebijakan dalam sistem internasional. Dalam kerangka ini, bahasa dipahami bukan hanya

sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dapat digunakan oleh negara untuk memperluas kepentingan nasional dan mempengaruhi struktur kekuasaan global (Quinn, 2017). BIPA sebagai kebijakan bahasa lintas negara bukanlah proyek netral, melainkan bagian dari agenda ekonomi-politik Indonesia untuk menguatkan posisi tawar diplomatik dan menciptakan jaringan kultural yang mendukung strategi luar negeri jangka panjang.

Wicaksono (2017) menyebut bahwa pengajaran bahasa dapat diposisikan sebagai bentuk *kebijakan perdagangan simbolik*, di mana negara mengejar nilai tukar yang tidak semata-mata berupa komoditas ekonomi, tetapi berupa legitimasi sosial dan afiliasi politik. Dalam hal ini, BIPA menjadi investasi strategis yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kompetitif dalam arsitektur kawasan.

#### 7. Bahasa sebagai Infrastruktur Sosial dan Kultural

Bahasa sebagai infrastruktur sosial dan kultural memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai jalinan institusional dan simbolik yang menopang terbentuknya masyarakat, identitas, dan tata kelola hubungan antaraktor sosial. Saddhono (2012) menekankan bahwa dalam praktik pembelajaran BIPA, bahasa berfungsi sebagai medium yang menghubungkan pembelajar dengan struktur sosial dan nilai-nilai kultural Indonesia. Dalam konteks global, bahasa yang dipelajari dalam ruang pendidikan tidak sekadar menyampaikan makna literal, tetapi juga membawa struktur relasi sosial dan asumsi budaya yang menyusunnnya.

Sebagai infrastruktur sosial, bahasa Indonesia dalam program BIPA memungkinkan terjadinya pertukaran antarbudaya yang bersifat transformatif. Budaya lokal Indonesia yang diinternalisasi melalui pembelajaran bahasa memperkuat posisi bahasa sebagai *carrier of identity* sekaligus mekanisme diplomasi nilai (Arwansyah et al., 2017). Maka, BIPA tidak hanya mentransfer kompetensi linguistik, tetapi juga mentransmisikan sistem makna dan nilai yang menghubungkan peserta didik asing dengan struktur sosial Indonesia.

#### 8. Pendekatan *Governing Language Policy* dalam Diplomasi

Pendekatan *governing language policy* dalam diplomasi memandang kebijakan bahasa sebagai bagian dari sistem tata kelola (*governance*) yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari negara, institusi pendidikan, masyarakat transnasional, hingga organisasi internasional. Rohimah (2018) menyatakan bahwa kebijakan BIPA tidak hanya diatur oleh satu institusi, tetapi merupakan hasil negosiasi lintas sektor antara kementerian-kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan, perguruan tinggi, dan mitra luar negeri. Hal ini menciptakan dinamika tata kelola yang kompleks di mana efektivitas diplomasi bahasa sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi, standar, dan konsistensi antaraktor dapat diwujudkan.

Melalui pendekatan ini, analisis terhadap BIPA tidak lagi hanya berfokus pada isi kurikulum atau kualitas pengajaran, tetapi juga pada dimensi manajerial dan politik kebijakan bahasa. Penyelenggaraan BIPA di Asia Tenggara, misalnya, sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor lokal, preferensi politik negara mitra, serta hubungan bilateral Indonesia dengan negara tersebut (Aninditya, 2015; Nugraheni et al., 2024). Oleh karena itu, tata kelola kebijakan BIPA harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur diplomasi yang adaptif dan multi-level.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami dinamika konseptual dan kebijakan terkait ekspansi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya Indonesia di Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam atas relasi-relasi makna, struktur kelembagaan, dan strategi simbolik yang tersembunyi di balik narasi kebijakan bahasa (Creswell, 2014). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menginterpretasi dokumen dan teks, dengan fokus pada konstruksi narasi, posisi simbolik BIPA, serta konteks ekonomi-politik yang melingkupinya.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang memungkinkan penelusuran mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa kebijakan, regulasi, maupun publikasi akademik. Studi kepustakaan sangat tepat digunakan dalam penelitian yang menitikberatkan pada penafsiran ide dan dinamika kebijakan lintas sektor seperti diplomasi budaya, *soft power*, dan pengelolaan bahasa (Zed, 2008). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi pola strategi, narasi ideologis, dan struktur kelembagaan yang membentuk kerangka ekspansi BIPA di kawasan ASEAN.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Posisi Strategis Bahasa Indonesia di Asia Tenggara

Di tengah arus globalisasi yang makin intensif, bahasa tidak lagi hanya dipandang sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai komoditas simbolik, identitas budaya, dan instrumen diplomasi. Globalisasi telah menciptakan dua arus utama dalam preferensi bahasa: di satu sisi, semakin menguatkan dominasi bahasa global seperti Inggris dan Mandarin sebagai alat ekonomi dan diplomasi; di sisi lain, justru membangkitkan kesadaran atas pentingnya bahasa kawasan dan bahasa lokal sebagai sarana pelestarian identitas dan kedekatan kultural (Quinn, 2017).

Dalam konteks Asia Tenggara, preferensi terhadap bahasa yang tidak hegemonik, namun akrab secara kultural dan netral secara geopolitik, semakin menguat. Bahasa Indonesia memiliki posisi unik dalam lanskap ini, karena merupakan bahasa resmi negara dengan jumlah penutur terbanyak di ASEAN dan memiliki kekerabatan linguistik yang erat dengan Bahasa Melayu yang tersebar di Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagian wilayah Thailand Selatan dan Filipina Selatan (Wicaksono, 2017).

Selain itu, tren digitalisasi dan ekspansi ekonomi kreatif Indonesia (musik, film, konten media sosial) turut meningkatkan eksposur dan ketertarikan terhadap Bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda di negara-negara ASEAN. Bahasa Indonesia dipandang mudah dipelajari, fleksibel, dan kaya makna budaya, atribut yang semakin penting dalam konteks globalisasi berbasis nilai dan konten.

Namun demikian, preferensi ini belum dibarengi dengan kebijakan regional yang menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung kawasan. Di sinilah peran BIPA menjadi strategis: sebagai jembatan antara potensi demografis Bahasa Indonesia dan peluang legitimasi simbolik di tingkat ASEAN, dengan membangun preferensi yang berbasis pengalaman, bukan sekadar propaganda.

Di tengah rivalitas antarnegara besar di Asia Tenggara, bahasa telah menjadi alat baru dalam kompetisi geopolitik regional. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan India telah mengintensifkan ekspansi simbolik mereka melalui lembaga pengajaran bahasa, seperti Confucius Institute dan Korean Cultural Centers, yang membawa serta narasi nasional mereka ke dalam kampus-kampus ASEAN (Sambas et al., 2022).

Indonesia, melalui program BIPA, mulai mengambil posisi dalam kontestasi ini. Namun dibandingkan negara-negara tersebut, ekspansi Bahasa Indonesia masih belum didukung oleh

infrastruktur kelembagaan dan strategi kebijakan luar negeri yang terintegrasi. Bahasa Indonesia seharusnya dapat menjadi instrumen kepemimpinan simbolik Indonesia di kawasan, bukan hanya sebagai bahasa nasional, tetapi sebagai representasi nilai-nilai kolektif ASEAN: pluralisme, keterbukaan, dan moderasi.

Bahasa Indonesia memiliki keunggulan strategis sebagai bahasa non-imperialis, tidak dikaitkan dengan sejarah kolonialisme maupun hegemoni politik. Nilai ini menjadi diferensiasi yang penting di tengah meningkatnya sensitivitas terhadap diplomasi dominatif. Dalam konteks ini, promosi Bahasa Indonesia bukan hanya soal linguistik, melainkan soal positioning Indonesia sebagai kekuatan budaya yang autentik, setara, dan inklusif di Asia Tenggara (Putera, 2024; Rohimah, 2018).

Namun, agar Bahasa Indonesia benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen geopolitik, diperlukan redefinisi posisi bahasa dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ini mencakup integrasi program BIPA ke dalam agenda diplomasi simbolik Indonesia secara eksplisit, peningkatan dukungan terhadap pusat studi Indonesia di luar negeri, dan penyusunan peta jalan penguatan status Bahasa Indonesia di forum-forum ASEAN seperti SEAMEO, AUN, dan AIPA.

## 2. Ekspansi BIPA: Strategi, Aktor, dan Mekanisme

Ekspansi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dua pilar utama: negara sebagai aktor kebijakan dan pengarah strategi, serta lembaga pendidikan sebagai pelaksana teknis dan produsen nilai. Namun, relasi antara keduanya saat ini masih ditandai oleh ketidaksinambungan, fragmentasi otoritas, dan absennya desain kelembagaan nasional yang mampu menyinergikan kekuatan keduanya secara sistematis (Rohimah, 2018; Nugraheni et al., 2024).

Negara melalui kementerian teknis memiliki peran sentral dalam memberikan arah strategis, dukungan politik, serta legitimasi kelembagaan bagi BIPA sebagai proyek diplomasi budaya. Kemendikbudristek, melalui Badan Bahasa, berperan dalam pengembangan kurikulum, pelatihan pengajar, dan penyusunan bahan ajar. Kemlu, khususnya melalui Direktorat Diplomasi Publik dan perwakilan luar negeri (KBRI, KJRI, Atase Pendidikan dan Kebudayaan), menjadi saluran utama diplomasi simbolik, membuka akses ke lembaga mitra luar negeri, dan menjadi fasilitator kerja sama.

Namun, peran negara sering kali terbatas pada fungsi administratif dan seremonial, tanpa mekanisme konsolidasi lintas kementerian yang menjadikan BIPA sebagai proyek lintas sektor dan lintas fungsi. Tidak ada grand strategy nasional yang mengintegrasikan pengajaran bahasa, diplomasi luar negeri, promosi budaya, dan pengembangan SDM secara simultan. Ketidadaan sistem insentif, penganggaran multiyear, serta indikator diplomatik yang jelas menyebabkan kontribusi negara belum maksimal dalam menjadikan BIPA sebagai alat soft power strategis (Putera, 2024).

Di sisi lain, perguruan tinggi memainkan peran sebagai aktor penggerak utama di lapangan. Mereka bukan hanya penyelenggara kelas BIPA, tetapi juga produsen konten budaya, pengirim pengajar, dan pemilik jaringan akademik luar negeri. Universitas-universitas besar seperti UGM, UI, UNY, dan UNNES telah memiliki pengalaman panjang dalam kerja sama internasional BIPA, termasuk penyusunan modul, pelatihan daring, dan pendirian pusat studi Indonesia di kampus mitra luar negeri (Arumdyahsari et al., 2016; Aninditya, 2015).

Namun, keterlibatan ini sering bersifat inisiatif individual, tidak dibarengi oleh dukungan sistemik dari negara. Tidak semua perguruan tinggi memiliki unit khusus BIPA yang didanai dan difasilitasi secara permanen. Kegiatan BIPA di banyak kampus masih dianggap proyek tambahan, bukan bagian dari strategi institusional atau indikator kinerja utama.

Selain itu, tidak ada sistem nasional yang menjamin penguatan kapasitas kelembagaan BIPA di tingkat perguruan tinggi, seperti skema akreditasi khusus, pelatihan terstandar nasional, atau program insentif kelembagaan untuk ekspansi internasional. Relasi antara negara dan lembaga pendidikan dalam ekspansi BIPA masih bersifat relasional dan pragmatis, belum berbasis sistem atau kontrak kinerja. Tidak ada regulasi yang mewajibkan sinkronisasi program BIPA antarperguruan tinggi negeri atau antara perguruan tinggi negeri dan Kementerian Luar Negeri. Akibatnya, program-program berjalan paralel, duplikatif, atau bahkan kontradiktif, terutama dalam hal target negara, standar pengajaran, dan desain kurikulum. Tanpa adanya mekanisme tata kelola nasional yang menjamin koordinasi vertikal (antara negara dan universitas) maupun horizontal (antaruniversitas dan antar-K/L), ekspansi BIPA akan tetap bersifat sporadis dan tidak mampu menjadi alat diplomasi lunak yang efektif dan berpengaruh.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pembentukan unit koordinasi nasional BIPA yang melibatkan lintas kementerian dan perguruan tinggi, dengan mandat strategis serta dukungan anggaran khusus. Selain itu, BIPA perlu diintegrasikan secara sistematis dalam Rencana Strategis (Renstra) Diplomasi dan Pendidikan Tinggi Nasional, termasuk melalui indikator kinerja luar negeri yang terukur. Skema insentif dan akreditasi kelembagaan bagi kampus pelaksana BIPA juga perlu dikembangkan, disertai pelatihan berjenjang dan sertifikasi nasional bagi para pengajar. Dengan penguatan sinergi antara negara dan lembaga pendidikan, BIPA memiliki potensi untuk bertransformasi dari sekadar program edukatif menjadi arsitektur diplomasi simbolik yang tertanam kuat di kawasan dan di panggung global.

### 3. Analisis Ekonomi-Politik atas Program BIPA

Analisis ekonomi-politik terhadap program BIPA menunjukkan bahwa ekspansi bahasa nasional tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan, kepentingan negara, dan posisi Indonesia dalam tatanan global. BIPA bukan sekadar program pengajaran bahasa, melainkan instrumen kebijakan luar negeri yang membawa misi diplomasi budaya sekaligus proyek ekspor nilai. Dalam kerangka ini, Bahasa Indonesia dikonstruksikan sebagai komoditas simbolik yang memperluas pengaruh lunak Indonesia melalui narasi pluralisme, sopan santun, dan kebhinekaan budaya (Quinn, 2017; Putera, 2024).

Dari perspektif ekonomi-politik, program BIPA dijalankan dalam arena yang penuh kontestasi. Bahasa Indonesia berkompetisi dengan bahasa global lain seperti Inggris dan Mandarin, yang didukung penuh oleh institusi besar seperti British Council dan Confucius Institute. Institusi-institusi ini tidak hanya menjalankan pengajaran bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai lengan kebudayaan negara dalam ekspansi pengaruh geopolitik dan ekonomi mereka (Sambas, Napitupulu, & Syaputra, 2022). Dalam konteks ini, BIPA menghadapi tantangan struktural karena belum memiliki sistem kelembagaan yang terpusat, pendanaan yang mapan, atau strategi ekspansi yang terkoordinasi secara nasional.

Lebih lanjut, ketimpangan kapasitas kelembagaan antara Indonesia dan negara pesaing menyebabkan program BIPA sering kali hanya tumbuh di negara-negara mitra karena relasi individual atau kerja sama bilateral yang tidak terintegrasi dalam strategi kawasan. Padahal, seperti disampaikan oleh Rohimah (2018), potensi Bahasa Indonesia sebagai bahasa kawasan sangat besar mengingat afinitas linguistik dan historisnya dengan masyarakat Melayu-Polinesia. Namun, tanpa desain ekonomi-politik yang menopang, potensi tersebut tidak berkembang menjadi arsitektur kebijakan luar negeri yang konkret.

Program BIPA juga mencerminkan dinamika internal antara kementerian dan lembaga penyelenggara di Indonesia. Ketidadaan tata kelola lintas sektor yang terkoordinasi membuat BIPA berjalan secara sektoral dan kurang memiliki efektivitas politik dalam menegosiasikan peran Bahasa Indonesia di forum multilateral seperti ASEAN dan SEAMEO (Putera, 2024). Ini

menjadi salah satu bukti bahwa program ini belum dijalankan sebagai strategi negara, melainkan sebagai kegiatan institusional yang masih terjebak dalam logika proyek jangka pendek.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi-politik menuntut pemerintah untuk memandang BIPA tidak hanya sebagai urusan pendidikan bahasa, tetapi sebagai bagian dari politik luar negeri kultural. Untuk itu, dibutuhkan penguatan regulasi, dukungan fiskal lintas kementerian, serta integrasi BIPA ke dalam sistem diplomasi publik nasional yang terstruktur. Tanpa transformasi kelembagaan dan strategi yang berbasis kepentingan nasional, BIPA akan sulit bersaing dalam pasar simbolik global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi.

#### 4. Tantangan dan Solusi Strategis Program BIPA

##### 4.1. Fragmentasi Kebijakan Antarinstansi dan Disintegrasi Strategi Diplomasi

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan BIPA sebagai proyek strategis nasional adalah fragmentasi kelembagaan. Saat ini, program BIPA dijalankan oleh berbagai aktor: Kemendikbudristek (melalui Badan Bahasa), Kemlu (melalui KBRI dan atase pendidikan), serta berbagai perguruan tinggi. Namun, tidak terdapat satu pun mekanisme koordinatif formal yang mampu menyatukan visi, perencanaan, dan pendanaan antarinstansi (Putera, 2024).

Akibatnya, kebijakan terkait BIPA berjalan dalam silo dan sering kali saling tumpang tindih. Misalnya, KBRI dapat menyusun agenda promosi BIPA tanpa merujuk pada standar kurikulum dari Badan Bahasa. Begitu pula universitas dapat menjalin MoU dengan mitra luar negeri secara independen tanpa melibatkan otoritas diplomatik negara. Ketidakterpaduan ini menyebabkan disintegrasi strategi diplomasi bahasa nasional, serta menyulitkan monitoring dan evaluasi dampak program secara lintas sektor (Rohimah, 2018).

Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan roadmap nasional BIPA yang menjelaskan posisi program ini dalam Renstra Diplomasi Publik maupun Renstra Pendidikan Tinggi. Tanpa arah kebijakan bersama, BIPA tetap akan bersifat eksperimental dan *ad hoc*, bukan program unggulan kebudayaan nasional yang terukur secara strategis.

##### 4.2. Standarisasi Bahan Ajar dan Kualitas Pengajar BIPA

Tantangan besar lainnya adalah ketimpangan kualitas bahan ajar dan kompetensi pengajar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini belum tersedia sistem akreditasi nasional untuk bahan ajar BIPA, sehingga banyak institusi menggunakan modul-modul yang tidak terstandar secara pedagogis maupun kultural (Kurniasih, 2021; Mulyaningsih & Khuzaemah, 2023).

Di sisi lain, pengajar BIPA masih sangat bergantung pada pelatihan informal dan pengalaman individual. Belum tersedia kerangka sertifikasi nasional yang menetapkan kompetensi minimal bagi pengajar BIPA untuk level internasional. Akibatnya, kualitas pengajaran sangat bervariasi antarnegara dan antarpengajar. Hal ini mengurangi kredibilitas dan daya saing BIPA dibanding institusi seperti Confucius Institute yang memiliki sistem pelatihan dan sertifikasi berjenjang secara global (Sambas et al., 2022).

Tanpa adanya standar minimum nasional, baik dalam hal konten, metodologi, maupun pelatihan, program BIPA sulit membangun identitas pedagogis yang kohesif dan profesional. Oleh karena itu, penguatan kurikulum dan kompetensi pengajar adalah syarat mutlak dalam proses institusionalisasi BIPA sebagai diplomasi budaya unggulan Indonesia.

#### 4.3. Kebutuhan Desain Ulang Insentif dan Regulasi Lintas Sektor

Salah satu hambatan struktural dalam pengembangan BIPA adalah minimnya insentif kelembagaan dan personal bagi pelaksana, mitra, dan pendukung program ini. Banyak perguruan tinggi melaksanakan BIPA hanya sebagai proyek pelengkap tanpa dukungan anggaran tetap, insentif pengajar, atau evaluasi berbasis kinerja (Putera, 2024). Hal yang sama terjadi di lembaga mitra luar negeri, yang sering kali tidak memiliki dukungan logistik maupun administratif untuk mempertahankan kelas BIPA dalam jangka panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa BIPA belum ditetapkan sebagai program prioritas nasional secara hukum dan fiskal. Tidak ada peraturan lintas sektor (misalnya perpres atau PP) yang menjamin penganggaran lintas K/L, koordinasi strategis, maupun perlindungan kelembagaan untuk program ini. Akibatnya, pengelolaan BIPA sangat rentan terhadap dinamika anggaran tahunan, rotasi SDM, dan pergantian prioritas politik.

Solusi jangka panjang yang dibutuhkan untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak program BIPA adalah melalui desain ulang regulasi dan arsitektur insentif lintas sektor secara menyeluruh. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Dana Nasional Diplomasi Bahasa yang bersumber dari anggaran negara maupun skema kemitraan internasional untuk mendukung kegiatan BIPA secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di samping itu, BIPA perlu ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam diplomasi budaya dan pendidikan tinggi, sehingga menjadi bagian integral dari tolok ukur keberhasilan kementerian terkait.

Penguatan insentif juga diperlukan, termasuk pemberian penghargaan dan dukungan bagi dosen diaspora, pengajar relawan, serta mitra asing yang berkontribusi dalam penyebaran bahasa Indonesia. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan, integrasi BIPA ke dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, Renstra Kementerian Luar Negeri, dan Renstra Kemendikbudristek menjadi keharusan, agar keberadaan program ini tidak sekadar simbolis, tetapi menjadi agenda strategis dalam kebijakan luar negeri dan pengembangan pendidikan nasional.

#### 4.4. Analisis *Benchmarking* BIPA vs Confucius Institute vs British Council

Bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kompetisi simbolik global. Bahasa Inggris telah lama menjadi lingua franca global dengan dukungan institusi seperti British Council dan sistem pendidikan kolonial yang diwariskan di banyak negara. Mandarin Tiongkok didukung penuh oleh negara melalui ekspansi besar-besaran Confucius Institute, dana pendidikan bahasa, dan diplomasi budaya yang agresif. Kedua bahasa ini tidak hanya hadir sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai proyek ideologis dan geopolitik (Rohimah, 2018; Sambas et al., 2022).

Dalam konteks ini, posisi Bahasa Indonesia masih lemah secara infrastruktur global, meskipun memiliki potensi diferensiasi yang kuat. Bahasa Indonesia tidak membawa beban sejarah kolonial dan tidak diasosiasikan dengan agenda kekuasaan, sehingga memiliki citra sebagai bahasa kawasan yang netral dan ramah. Keunggulan ini harus dikapitalisasi melalui narasi diplomasi budaya yang inklusif, dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan nilai (Quinn, 2017).

Analisis *benchmarking* atas program BIPA, Confucius Institute, dan British Council dapat dijelaskan dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1: Benchmarking BIPA, Confucius Institute, & British Council**

Aspek	BIPA	Confucius Institute	British Council
Negara asal	Indonesia	Tiongkok	Inggris

Cakupan global	Terbatas (fokus Asia Tenggara)	Sangat luas (>150 negara)	Sangat luas (>150 negara)
Pendanaan	Bervariasi, proyek <i>ad hoc</i>	Sangat besar, langsung dari negara	Stabil, kombinasi hibah dan mitra
Jaringan institusi	Terbatas, tidak terintegrasi nasional	Ratusan pusat resmi di kampus mitra	Pusat budaya, uji kemampuan bahasa
Fokus	Bahasa, budaya lokal, narasi toleransi	Bahasa Mandarin, budaya dan nilai negara	Bahasa Inggris, seni, pendidikan
Model operasional	MoU bilateral	Lembaga negara, pusat budaya formal	Semi-pemerintah, inklusi dan budaya
Strategi branding	Netral, plural, kawasan ASEAN	Warisan Tiongkok, kekuatan negara	Modernitas, <i>global excellence</i>
Integrasi diplomasi	Belum sepenuhnya terhubung ke strategi luar negeri	Terintegrasi dalam <i>Belt and Road</i>	Bagian dari beasiswa & budaya luar negeri
Kelebihan	Afinitas regional, nilai kultural plural	Dana besar, sistem kuat, kecepatan ekspansi	Reputasi global, keunggulan institusi
Tantangan	Fragmentasi, dana minim, belum digital	Resistensi ideologi, sentimen politik	Akses komersial tidak merata

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

*Benchmarking* antara BIPA, Confucius Institute, dan British Council menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam skala, strategi, dan kapasitas kelembagaan masing-masing. BIPA, yang merupakan program unggulan Indonesia, masih terbatas pada kawasan Asia Tenggara dan belum memiliki daya jangkauan global seperti Confucius Institute dari Tiongkok dan British Council dari Inggris yang telah hadir di lebih dari 150 negara. Ketimpangan ini tidak lepas dari aspek pendanaan, di mana BIPA sangat bergantung pada proyek *ad hoc* yang tidak konsisten, sementara Confucius Institute didukung penuh oleh negara, dan British Council memiliki pendanaan stabil dari kombinasi hibah pemerintah serta mitra internasional.

Jaringan kelembagaan BIPA pun masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara nasional, berbeda dengan ratusan pusat Confucius Institute yang tersebar di kampus-kampus mitra global dan pusat-pusat budaya British Council yang terstandarisasi. Dari sisi fokus, BIPA menonjolkan narasi toleransi, budaya lokal, dan nilai pluralisme yang khas Indonesia, sedangkan Confucius Institute membawa misi penyebaran bahasa Mandarin dan nilai-nilai Tiongkok, dan British Council mengedepankan bahasa Inggris dalam konteks seni, pendidikan, dan modernitas.

Perbedaan juga terlihat dari model operasional masing-masing. BIPA menggunakan pendekatan fleksibel berbasis MoU bilateral yang kurang terstandarisasi, sementara dua lembaga lainnya beroperasi dengan model institusi resmi negara atau semi-pemerintah yang memungkinkan konsistensi dan skala program. Strategi branding BIPA menawarkan pendekatan netral dan khas Asia Tenggara yang berpotensi diterima secara luas di kawasan, sedangkan Confucius Institute berorientasi pada warisan budaya dan kekuatan negara, dan British Council mengusung nilai-nilai *global excellence*.

Namun, dalam integrasi dengan strategi diplomasi luar negeri, BIPA belum sepenuhnya terhubung secara sistemik, sementara Confucius Institute menjadi bagian

strategis dari Belt and Road Initiative, dan British Council telah lama menjadi alat diplomasi budaya Inggris melalui beasiswa dan kerja sama internasional. Dalam hal kelebihan, BIPA memiliki afinitas kultural yang kuat di kawasan ASEAN, tetapi menghadapi tantangan besar berupa fragmentasi kelembagaan, pendanaan yang belum stabil, dan infrastruktur digital yang lemah. Sebaliknya, Confucius Institute mampu berekspansi cepat tetapi tidak luput dari resistensi ideologis dan sentimen politik, sementara British Council memiliki reputasi global namun akses programnya belum merata karena kecenderungan komersialisasi.

Dari analisis ini, terlihat bahwa BIPA memiliki potensi diferensiasi yang unik berbasis nilai lokal dan regional, namun membutuhkan penguatan struktural, pendanaan berkelanjutan, digitalisasi, serta integrasi diplomasi budaya yang lebih strategis jika ingin bersaing secara global dalam lanskap pendidikan dan diplomasi bahasa.

#### 4.5. Rekomendasi Strategi Diferensiasi BIPA

Strategi diferensiasi BIPA perlu dimulai dengan penetapan fokus kawasan yang jelas, yaitu ASEAN. Positioning BIPA sebagai “Bahasa Asia Tenggara” yang netral dan mudah dipelajari dapat memberikan keunggulan tersendiri dibanding bahasa asing lainnya. Selain memiliki akar sejarah dan kedekatan budaya dengan negara-negara ASEAN, Bahasa Indonesia juga dapat diposisikan sebagai bahasa regional yang tidak menimbulkan dominasi geopolitik. Ini membuatnya menjadi alat komunikasi yang inklusif dan mencerminkan nilai kolektif ASEAN seperti harmoni, musyawarah, dan solidaritas kawasan.

Diferensiasi BIPA juga harus dibangun melalui narasi budaya yang kuat. Dengan mengangkat nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan gotong royong yang melekat dalam budaya Indonesia, branding BIPA dapat tampil lebih humanistik dan inklusif. Narasi ini menjadi pembeda yang signifikan dibanding bahasa Mandarin yang diasosiasikan dengan kekuatan negara atau Bahasa Inggris yang cenderung dominan secara historis dan struktural. BIPA dapat menjadi representasi dari soft power Indonesia yang mengusung keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan.

Transformasi digital merupakan kebutuhan strategis agar BIPA lebih adaptif dan menjangkau generasi muda di era teknologi. Pengembangan platform e-learning, aplikasi mobile, hingga microlearning seperti konten di TikTok Edu dan YouTube Shorts, akan meningkatkan keterlibatan pengguna sekaligus memperluas akses. Strategi ini tidak hanya mencerminkan modernisasi dalam penyampaian materi, tetapi juga memungkinkan pembelajaran lintas batas negara secara fleksibel dan berbiaya rendah.

Dibutuhkan sebuah sekretariat nasional yang bersifat lintas kementerian dan perguruan tinggi untuk memastikan harmonisasi arah, pendanaan, sumber daya manusia, serta kurikulum BIPA. Koordinasi kelembagaan ini penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan duplikasi program. Dengan adanya satu badan koordinatif, BIPA dapat dikembangkan secara konsisten sebagai kebijakan publik jangka panjang yang terintegrasi dalam agenda diplomasi dan pendidikan nasional.

Untuk memperkuat legitimasi dan daya jangkau regional, BIPA harus diarusutamakan ke dalam forum-forum multilateral seperti SEAMEO, ASEAN, dan ASEAN University Network (AUN). Melalui kerja sama ini, BIPA dapat menjadi bagian dari kerangka integrasi kawasan, baik melalui program pertukaran, kurikulum bersama, maupun pengakuan akademik regional. Pendekatan ini akan meningkatkan posisi BIPA tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kohesi dan identitas Asia Tenggara.

## Kesimpulan

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) telah berkembang dari sekadar sarana pembelajaran bahasa menjadi infrastruktur diplomatik lunak yang merepresentasikan identitas, nilai, dan kepentingan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa BIPA memainkan peran strategis sebagai kanal *soft power* yang membawa narasi pluralisme, toleransi, dan keberagaman budaya ke dalam arena internasional. Namun demikian, potensi strategis ini masih terhambat oleh fragmentasi kebijakan antarinstansi, ketimpangan mutu bahan ajar dan pengajar, serta belum adanya integrasi dalam kerangka diplomasi lintas sektor. Dalam lanskap persaingan bahasa global yang semakin kompetitif, BIPA membutuhkan reposisi kelembagaan dan intervensi kebijakan yang sistemik untuk menjadikannya sebagai proyek simbolik negara. Reformasi tata kelola, pembangunan ekosistem pembelajaran yang terstandar, penguatan insentif kelembagaan, serta integrasi ke dalam diplomasi regional ASEAN menjadi kunci agar BIPA tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang sebagai pilar pengaruh budaya Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

### Daftar Pustaka

- Aninditya, S. N. (2015). Pengembangan program profesionalisme dosen pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di ASEAN. *Al Bidayah*, 7(1), 89–101.
- Arumdyahsari, S., Hs, W., & Susanto, G. (2016). *Pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) tingkat madya* (Tesis Doktoral, Universitas Negeri Malang).
- Arwansyah, Y. B., Suwandi, S., & Widodo, S. T. (2017, November). Revitalisasi peran budaya lokal dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). *Proceedings Education and Language International Conference*, 1(1).
- Azizah, R. F. (2013). *Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) program CLS di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2012* (Tesis Doktoral, Universitas Negeri Malang).
- Budiawan, R. Y. S., & Rukayati, R. (2018). Kesalahan bahasa dalam praktik berbicara pembelajaran BIPA di Universitas PGRI Semarang. *KREDO*, 2(1), 88–97.
- Defina, D. (2018). Model penelitian dan pengembangan materi ajar BIPA. *Indonesian Language Education and Literature*, 4(1), 36–51.
- Fitria, T. N. (2023). Introducing Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA): Method and challenges of teaching Indonesian as a Foreign Language (IFL). *Inovasi Kurikulum*, 20(2), 205–224.
- Hermoyo, R. P., & Suher, M. (2017). Peranan budaya lokal dalam materi ajar BIPA. *ELSE: Elementary School Education Journal*, 1(2b).
- Kurniasih, D. (2021). Analisis bahan ajar BIPA sahabatku Indonesia tingkat dasar. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 12(1), 25–45.
- Kusmiatun, A. (2019). *Mengenal BIPA dan pembelajarannya*. Penerbit K-Media.
- Mulyaningsih, I., & Khuzaemah, E. (2023). Bahan ajar BIPA tingkat pemula berbasis budaya Cirebon. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 12(2), 320–330.
- Muhammadiyah, M. U., et al. (2024). *Bahasa dan Sastra Indonesia: Menyelami Kekayaan Budaya dan Bahasa Bangsa*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Murtianis, A., & Rohmadi, M. (2019). Kendala transfer budaya dalam pembelajaran BIPA di Universitas Sebelas Maret. *Diglosia*, 3(1), 36–45.
- Nugraheni, L., et al. (2024). Problematika pembelajaran BIPA di Indonesia. *Scientia*, 3(2).
- Purbarani, E., Muliastuti, L., & Farah, S. (2021). Pengembangan model materi ajar BIPA. *BASA: Journal of Language & Literature*, 1(2), 50–60.
- Putera, A. P. (2024). *Indonesia's Soft Power Diplomacy in Azerbaijan* (Tesis Doktoral).

- Quinn, G. (Ed.). (2017). *Pemartabatan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Konstelasi Politik dan Ekonomi Dunia*. Media Nusa Creative.
- Rahma, F. (2025). Menulis kreatif mahasiswa BIPA melalui peran tokoh abnormal. *Dimensi Kreatif dalam Pembelajaran BIPA*, 115.
- Riana, D. R. (2020). *Jurnal Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*, 2(1), 36–47.
- Rohimah, D. F. (2018). Internasionalisasi dan internalisasi budaya dalam BIPA. *An-Nas*, 2(2), 199–212.
- Rosiyana, R. (2020). Pemerolehan bahasa kedua dalam pembelajaran BIPA. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 4(3), 374–382.
- Ruskhan, A. G. (2007, November). Pemanfaatan keberagaman budaya Indonesia dalam pengajaran BIPA. *Makalah Seminar Asosiasi Jepang–Indonesia, Nagoya*.
- Saddhono, K. (2012). Kajian sosiolinguistik pemakaian bahasa mahasiswa asing dalam BIPA di UNS. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 24(2), 176–186.
- Sambas, C. M., Napitupulu, M. F., & Syaputra, E. (2022). BIPA sebagai upaya internasionalisasi universitas. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 103–108.
- Sari, N. P. A. W., Utama, I. M., & Utama, I. D. G. B. (2016). BIPA di Sekolah Cinta Bahasa, Bali. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha*, 5(3), 1–11.
- Suyitno, I. (2007). Pengembangan bahan ajar BIPA berbasis analisis kebutuhan belajar. *Wacana*, 9(1), 5.
- Suyitno, I. (2008). Norma pedagogis dan analisis kebutuhan dalam BIPA. *Diksi*, 15(1).
- Suyitno, I. (2017). Aspek budaya dalam pembelajaran BIPA. *FKIP E-Proceeding*, 55–70.
- Tanwin, S. (2020). BIPA dalam upaya internasionalisasi universitas. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 2(2), 156–163.
- Wicaksono, A. (2017). *Sekilas Tentang Bahasa Indonesia (Revisi)*. Garudhawaca.
- Wirawan, A. K. (2018). Pembelajaran BIPA dengan metode immersion terintegrasi budaya Indonesia.
- Zulfahmi, H. B. (2017). Model pembelajaran tutorial BIPA. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 7(2).